



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG



LAPORAN KEUANGAN TA 2025

**PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2025
AUDITED**

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pangkalpinang, 27 April 2026

Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran dan Daftar	

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**
JL. PROFESI NOMOR 4, PANGKALPINANG33149
TELEPON (0717) 434756, FAXIMILE (0717) 426434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pangkalpinang, 27 April 2026

Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si
NIP 197805252000031002

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 51.735.000,- atau mencapai 34.49% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp150.000.000. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 354.355.000,- atau mencapai 70.87% persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 500.000.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.884.843.299,- yang terdiri dari: Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar sebesar Rp.20.221.491,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Jumlah Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 62.337.802,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 5.821.768.608,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 42.853.200,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. Rp. 62.337.802,- dan Rp. 5.882.505.497,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.51.735.000,- sedangkan jumlah

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.5.601.922.561,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.550.187.561,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.53.927.840- dan Rp.0,-. Sehingga Nilai Defisit LO Sebesar Rp. 5.604.115.401,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.239.436.581,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (5.604.115.401,-) dikurangi dengan Koreksi yang mengurangi ekuitas ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2.475.000,- Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp. 416.931.084,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 5.822.505.497,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025		% thd Angg aran	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	150.000.000,-	51.735.000,-	34.49	354.355.000,-
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.173.419.000,-	3.139.913.611,-	98.94	3.065.578.687,-
Belanja Barang	B.4	2.223.260.000,-	2.042.819.396,-	91.88	2.693.361.905,-
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Batuan Sosial	B.6				
Jumlah Belanja		5.396.679.000,-	5.182.733.007,-	96.04	5.758.940.592,-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.908.991	
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	16.312.500	73.355.730,-
Persediaan yang Belum Diregister			
Jumlah Aset Lancar		20.221.491	73.355.730,-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	643.068.788	643.068.788
Peralatan dan Mesin	C.15	5.970.716.996	5.674.833.996
Gedung dan Bangunan	C.16	5.418.737.430	5.418.737.430
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1.214.487.100	1.214.487.100
Aset Tetap Lainnya	C.18	61.180.000	61.180.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	7.486.421.706	6.829.464.571,-
Jumlah Aset Tetap		5.821.768.608	6.182.842.743,-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21		-
Aset Lain-Lain	C.22		-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23		-
Jumlah Aset Lainnya		42.853.200	
JUMLAH ASET		5.884.843.299	6.256.198.473,-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	58.428.811	16.761.892
Utang yang belum ditagihkan	C.26		
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.27		
Utang Jangka Pendek lainnya		3.908.991	
JUMLAH KEWAJIBAN		62.337.802	16.761.892
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	5.882.505.497	6.239.436.581,-
JUMLAH EKUITAS		5.882.505.497	6.239.436.581,-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.884.843.299	6.256.198.473

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	51.735.000	354.355.000
JUMLAH PENDAPATAN		51.735.000	354.355.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.139.913.611	3.065.578.687
Beban Persediaan	D.3	173.967.800	124.934.108
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.429.508.915	1.850.911.279
Beban Pemeliharaan	D.5	437.978.350	335.729.102
Beban Perjalanan Dinas	D.6	57.004.750	426.380.751
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	363.549.135	513.438.908
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		5.601.922.561	6.316.972.835
SURPLUS (DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.550.187.561	5.962.617.835
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Jumlah surplus/ (defisit) pelepasan aset Non lancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		53.927.840	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.604.115.401	5.962.617.835
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP			
Beban Perjalanan Dinas			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		5.604.115.401	5.962.617.835

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Dec-25	Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	6.239.436.581	12.635.457.565
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.604.115.401	5.962.617.835
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.475.000	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	2.475.000	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		5.184.709.317	433.403.149
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	416.931.084	6.396.020.984
EKUITAS AKHIR	E.5	5.822.505.497	6.239.436.581

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

a

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Pangkalpinang

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Merupakan salah satu UPT dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Komplek Perkantoran Kep.Bangka Belitung Jln Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149. Sesuai dengan Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini menyatakan : Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT BPPMHKP adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Adapun Tugas dan Fungsi BPPMHKP ialah sebagai berikut : • Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan Inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
--	---

- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan- LRA

-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp.

51.735.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 51.735.000,- atau mencapai 34.49% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.150.000.000. Pendapatan Kantor SKIPM Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Jasa (Jasa karantina) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	150.000.000	51.735.000	34,49
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	150.000.000	51.735.000	34,49

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2025

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Lalu	0	0	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	51.735.000	354.355.000	
Jumlah	51.735.000	354.355.000	14,60

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp.

5.182.733.007

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.182.733.007,- atau 96.04% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.396.679.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.173.419.000	3.139.913.611	98,94
Belanja Barang	2.223.260.000	2.042.819.396	91,88
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.396.679.000	5.182.733.007	96,04
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.396.679.000	5.182.733.007	96,04

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.139.913.611	3.065.578.687	2,42
Belanja Barang	2.042.819.396	2.693.361.905	(24,15)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.182.733.007	5.758.940.592	(10,01)

Belanja

Pegawai Rp.
3.139.913.611

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.139.913.611,- dan Rp 3.065.578.687,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI DESEMBER 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.320.646.335	1.358.714.444	2,88
Pengembalian tunjangan fungsional	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	150.869.929	92.641.867	(38,59)
Belanja Honorarium	87.840.000	74.888.000	-
Belanja lembur / makan	51.497.000	79.612.000	54,60
Pengembalian belanja lembur	0	0	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.529.060.347	1.459.722.376	(4,53)
Jumlah Belanja Kotor	3.139.913.611	3.065.578.687	(2,37)

Belanja

Barang Rp.

2.042.819.396

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.042.819.396 dan Rp.2.693.361.905,-

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Nama Barang	REALISASI DESEMBER 2025	REALISASI DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	548.134.361	649.180.707	(15,57)
Belanja Barang Non Operasional	94.179.700	112.247.000	(16,10)
Belanja Jasa	788.381.135	1.095.913.945	(28,06)
Belanja Pemeliharaan	436.613.450	330.802.102	31,99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	57.004.750	426.380.751	(86,63)
Belanja Barang Persediaan	118.506.000	78.837.400	50,32
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.042.819.396	2.693.361.905	(24,15)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2.042.819.396	2.693.361.905	(24,15)

Belanja

Modal Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor		0	0,00
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	des-2025	des-24
Uang Tunai		-
Bank BRI No.acc 006301000914302		-
Jumlah		-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Penerimaan PNPB langsung disetor ke dalam kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.3.908.991

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.3.908.991,- dan Rp.0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Kas tersebut adalah berupa Pajak dari GU Nihil yang belum disetorkan di Desember 2025 dikarenakan adanya kendala pada aplikasi cortex pada saat pembuatan spt dan baru disetorkan di Januari 2026.

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.908.991	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		-
Jumlah	3.908.991	-

Piutang PNB
Rp.0

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp,0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0,-

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1			-
2			-
Jumlah			-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar
di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Listrik	-	-
Pembayaran Telpon dan Fax	-	-
Pembayaran pengiriman Dokumen	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2025 dan 2024*

Jenis	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan		-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		-
Jumlah		-

Persediaan

Rp.16.312.500

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.16.312.500 dan Rp. 73.355.730,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	31/12/2025	31-Dec-24
Barang Konsumsi	16.312.500	73.355.730
Barang untuk Pemeliharaan	-	
Suku Cadang	-	
Bahan Baku	-	
Jumlah	16.312.500	73.355.730

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1			-
2			-
3			-
6			-
Jumlah			-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TA 2025	TA 2024
1		-	
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Penyisihan Piutang Tak

Rp.0

Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp.
643.068.788

C.14 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 31Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 643.068.788,- dan Rp.643.068.788,- ,.-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	643.068.788
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2024	643.068.788

Peralatan dan
Mesin Rp.
5.970.716.996,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 5.970.716.996,- dan Rp 5.674.833.996. Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2025	5.674.833.996
Mutasi tambah:	408.517.365
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk (1 unit Nissan serena)	295.883.000
Reklasifikasi Masuk (Koreksi Akun)	112.634.365
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi keluar (koreksi akun)	(112.634.365)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	5.970.716.996

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
5.418.737.430

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.5.418.737.430,- dan Rp.5.418.737.430,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada gedung dan bangunan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	5.418.737.430
Mutasi tambah:	-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0
Perjalanan Dinas Pembangunan Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.418.737.430
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.418.737.430

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp1.214.487.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.214.487.100,- dan Rp. 1.214.487.100 Mutasi transaksi

terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.214.487.100
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	
Nilai Buku per 30 September 2025	1.214.487.100

Aset Tetap

Lainnya

Rp.61.180.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.61.180.000 dan Rp.61.180.000. Aset tetap tersebut berupa barang. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	61.180.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	61.180.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Rp.

7.486.421.706

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.7.486.421.706,- dan Rp. 6.829.464.571,- Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2025

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 58.428.811,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 58.428.811,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga berupa : tagihan listrik sebesar Rp 13.166.062,- tagihan telepon sebesar Rp.0, tagihan Surat dinas Pos sebesar Rp. 38.700,- dan Tagihan Internet sebesar Rp. 2.370.849,- serta terdapat Pembayaran Gaji PJLP dan Outshorching driver di bulan desember 2025 yang menggunakan Mekanisme Pembayaran Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp. 42.853.200,-

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.

Uraian	Jumlah
Listrik	13.166.062
Internet	2.370.849
Tagihan Surat Dinas	38.700
Pembayaran Gaji PJLP Mekanisme RPATA	42.853.200
Total	58.428.811

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.
5.822.505.497,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.822.505.497,- dan Rp.6.239.436.581,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp. 51.735.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 51.735.000 dan Rp 354.355.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 204 2dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin		0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	51.735.000	354255000
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Tahun Lalu		
Pendapatan jasa Karantina Perikanan		100000
Jumlah	51.735.000	354355000

Beban Pegawai
Rp. 3.139.913.611
3.139.913.611,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.139.913.611,- dan Rp. 3.065.578.687 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal..

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Beban Gaji	1.086.184.148	1.088.374.675
Beban Tunjangan-tunjangan	1.806.034.463	1.741.565.012
Beban Uang makan	196.198.000	156.027.000
Beban Uang Lembur	51.497.000	79.612.000
Jumlah	3.139.913.611	3.065.578.687

Beban

Persediaan Rp.
173.967.800

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 173.967.800 dan Rp. 124.934.108. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Beban Persediaan Konsumsi	173.967.800	124.934.108
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		
Beban persediaan suku cadang		
Beban Persediaan Lainnya		
Beban persediaan bahan baku		
Beban Persediaan Rusak/ Usang		
Jumlah	173.967.800	124.934.108

Beban Barang

dan Jasa Rp.
1.429.508.915

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.429.508.915,- dan Rp. 1.850.911.279. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Keperluan Perkantoran	429.496.879	561844307
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.880.000	47520000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.898.200	8228651
Beban Honor Operasional Satker	87.840.000	69992000
Beban Barang Operasional Lainnya	5.648.200	35062900
Beban Barang operasional - Penanganan Pandemi COVID		
Beban Bahan	94.179.700	28513600
Beban Honor Output Kegiatan		4896000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	
Beban Langganan Listrik	152.459.186	220089600
Beban Langganan Telpon	200.000	96121
Beban Langganan Air	0	
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	
Beban sewa	31.000.000	43665000
Beban Jasa Profesi	0	3600000
Beban Jasa Lainnya	602.906.750	827403100
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	0	
Jumlah	1.429.508.915	1850911279

Beban

Pemeliharaan

Rp. 437.978.350.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 437.978.350. dan Rp 335.729.102. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266.028.050	179104306
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.585.400	151697796
Beban bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)		
Beban pemeliharaan Jaringan		
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	1.364.900	4927000
Beban Persediaan suku cadang		
Jumlah	437.978.350	335729102

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 57.004.750,- dan Rp. 426.380.751. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Rp. 57.004.750,-

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Perjalanan Biasa	57.004.750	369915576
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		17510000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		18000000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		20955175
Jumlah	57.004.750	426380751

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		
Beban Persediaan pita, cukai, materai dan legas		
Jumlah		

Beban Bantuan
Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	TA 2023
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		0	0
Jumlah		0	0

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
363.549.135

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.363.549.135 dan Rp,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160.166.146	154.552.044	4
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.980.768	96.983.857	15
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	76.943.810	41.317.688	86
Beban Penyusutan Irigasi	11.966.486	5.983.243	100
Beban Penyusutan Jaringan	2.491.925	1.245.963	100
Beban Penyusutan Aset tetap yg tidak di gunakan pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	363.549.135	300.082.795	21
			-
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban lain-lain	-	-	-
Amortisasi	363.549.135	300.082.795	21

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0
Jumlah		0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Persediaan Rusak/Usang *)	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Jumlah	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
6.239.436.581

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.239.436.581 dan Rp. 12.635.457.565,-

Defisit LO
Rp
(5.604.115.401)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.604.115.401 dan Rp (5.962.617.835) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Persediaan Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi nilai persediaan	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Aset Tetap Rp.0 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.475.000 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rp.2.475.000

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi aset tetap	-
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain- **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Lain Rp.0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara

lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

E.4 Transaksi Antar Entitas

Entitas Rp.

5.184.709.317

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.184.709.317 dan Rp. 433.403.149 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.0, sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 53.711.310,- 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	sertifikat kesehatan HC dan Bahan LAB	Sekretariat BKIPM dan BUSKI	53.711.310

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BABUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0. dari total Rp0,- . Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kabupaten Belitung	Tanah	
2	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Tanah	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp. **E.5 Ekuitas Akhir**

5.822.505.497,- Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.822.505.497,- dan Rp. 6.239.436.581,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Pada Periode 30 juni 2025 tidak ada temuan Koreksi dari Tim BPK RI maupun tim dari APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pelaporan Keuangan Stasiun KIPM Pangkalpinang.

F.2.2. Belanja Pegawai

Pada Pertengahan Tahun 2025 Terdapat beberapa Pegawai PNS yang Mutasi ke Satker Lain, sehingga menyebabkan berkurang jumlah pegawai PNS di lingkup SKIMP Pangkalpinang, tetapi hal ini bisa sedikit tertutupi karena per Oktober 2025 terdapat penambahan belanja pegawai karena adanya 6 orang PPPK yang baru dilantik.

F.2.3. Belanja Barang

Adanya Efisiensi Anggaran dan pengurangan anggaran TA 2025 menyebabkan Belanja Barang periode 31 Desember 2025 lebih kecil dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Penurunan cukup signifikan ada pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja Perjalanan dinas dalam negeri.

F.2.4. Kas Lainnya dan setara kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.3.908.991,- Kas tersebut adalah berupa Pajak dari GU Nihil yang belum disetorkan di Desember 2025 dikarenakan adanya kendala pada aplikasi cortex pada saat pembuatan spt dan baru disetorkan di Januari 2026

F.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Terdapat Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 62.337.802,-

Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Dibayarkannya Gaji PJLP dan Outshorching bulan desember 2025 dengan Mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) Mengakibatkan munculnya Utang Pihak Ketiga sebesar Rp. 42.853.200,- antara lain :

- Pembayaran Gaji desember 2025 PJLP 1 orang keamanan, 1 orang Pramubakti masing-masing Sebesar Rp. 3.876.600,-
 - Pembayaran Gaji desember 2025 Outsourcing Keamanan 4 orang sebesar Rp. 15.600.000,-
 - Pembayaran Gaji desember 2025 Outsourcing Pramubakti 3 orang sebesar Rp. 11.700.000,-
 - Pembayaran Gaji desember 2025 Outsourcing OB dan driver 2 orang sebesar Rp. 7.800.000,-
2. Terdapat Hutang listrik, Pos dan Internet tagihan desember 2025 senilai Rp. 15.575.611,-
 3. Serta terdapat Pajak GU Nihil yang tidak bisa disetorkan di desember dikarenakan kendala pada aplikasi cortex dan baru bisa disetorkan ke Bank pada januari 2026 sebesar Rp. 3.908.991,-

F.2.5 Penjelasan Target PNB

Masih belum tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Periode 31 Desember 2025 pada Stasiun KIPM Pangkalpinang disebabkan oleh :

1. Penerapan Tarif PNB lalulintas media pembawa domestic sebesar Rp.0, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Ketidak tersediaanya bahan pengujian sampel parameter uji tertentu yang tidak terpenuhi dikarenakan efisiensi anggaran.
3. Tidak terdapat pungutan PNB uji organo lapangan dikarenakan tahap verifikasi lapangan dihilangkan pada alur penerbitan Health Sertificate (HC)
4. Tidak Terdapat pengujian lab parameter penyakit ikan terhadap penerapan end product testing pada produk non mutu yg akan diekspor (Karena tupoksi sudah beralih ke BARANTIN).

F.2.3. PENJELASAN ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL (PN)
TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01, 02 dari 5 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp.**195.040.000,-** dan realisasi Rp.**192.381.975,-** atau **98.64%** dan masih terdapat kegiatan yang belum terlaksanakan, dikarenakan anggaran terkena blokir automatic adjustment (AA) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penjelasan terkait Anggaran Prioritas Nasional TA 2025

NO	Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	EC.3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	10.000.000	9.673.908	96.74%
2	EC. 3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	15.000.000	14.861.917	99.08%
3	EC.7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	128.520.000	126.501.000	98.43%
4	EC.7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	24.825.150	99.30%
5	EC.7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	16.520.000	16.520.000	100%
Jumlah			195.040.000	192.381.975	98.64%

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TA 2025

**PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2025
AUDITED**

**STASIUN KARANTINAA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG 649699

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	150,000,000	51,735,000	(98,265,000)	34	500,000,000	354,355,000	145,645,000	71
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	150,000,000	51,735,000	(98,265,000)	34	500,000,000	354,355,000	145,645,000	71
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	150,000,000	51,735,000	(98,265,000)	34	500,000,000	354,355,000	145,645,000	71
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,396,679,000	5,182,733,007	(213,945,993)	96	5,836,936,000	5,758,940,592	77,995,408	99
1. Belanja Pegawai	3,173,419,000	3,139,913,611	(33,505,389)	99	3,068,504,000	3,065,578,687	2,925,313	100
2. Belanja Barang	2,223,260,000	2,042,819,396	(180,440,604)	92	2,768,432,000	2,693,361,905	75,070,095	97
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG 649699

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,396,679,000	5,182,733,007	(213,945,993)	96	5,836,936,000	5,758,940,592	77,995,408	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



Pangkalpinang, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,239,436,581	12,635,457,565	(6,396,020,984)	(50.62)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,604,115,401)	(5,962,617,835)	358,502,434	(6.01)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,475,000	0	2,475,000	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,475,000	0	2,475,000	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,184,709,317	(433,403,149)	5,618,112,466	(1,296.28)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(416,931,084)	(6,396,020,984)	5,979,089,900	(93.48)
EKUITAS AKHIR	5,822,505,497	6,239,436,581	(416,931,084)	(6.68)

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,908,991	0	3,908,991	0.00
Persediaan	16,312,500	73,355,730	(57,043,230)	(77.76)
JUMLAH ASET LANCAR	20,221,491	73,355,730	(53,134,239)	(72.43)
ASET TETAP				
Tanah	643,068,788	643,068,788	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,970,716,996	5,674,833,996	295,883,000	5.21
Gedung dan Bangunan	5,418,737,430	5,418,737,430	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,214,487,100	1,214,487,100	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	61,180,000	61,180,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,486,421,706)	(6,829,464,571)	(656,957,135)	9.62
JUMLAH ASET TETAP	5,821,768,608	6,182,842,743	(361,074,135)	(5.84)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	42,853,200	0	42,853,200	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	42,853,200	0	42,853,200	
JUMLAH ASET	5,884,843,299	6,256,198,473	(371,355,174)	(5.94)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	58,428,811	16,761,892	41,666,919	248.58
Utang Jangka Pendek Lainnya	3,908,991	0	3,908,991	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62,337,802	16,761,892	45,575,910	271.90
JUMLAH KEWAJIBAN	62,337,802	16,761,892	45,575,910	271.90
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,822,505,497	6,239,436,581	(416,931,084)	(6.68)
JUMLAH EKUITAS	5,822,505,497	6,239,436,581	(416,931,084)	(6.68)
JUMLAH EKUITAS	5,822,505,497	6,239,436,581	(416,931,084)	(6.68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,884,843,299	6,256,198,473	(371,355,174)	(5.94)

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:01 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	51,735,000	354,355,000	(302,620,000)	(85.4)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	51,735,000	354,355,000	(302,620,000)	(85.4)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	51,735,000	354,355,000	(302,620,000)	(85.4)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,139,913,611	3,065,578,687	74,334,924	2.425
Beban Persediaan	173,967,800	124,934,108	49,033,692	39.248
Beban Barang dan Jasa	1,429,508,915	1,850,911,279	(421,402,364)	(22.767)
Beban Pemeliharaan	437,978,350	335,729,102	102,249,248	30.456
Beban Perjalanan Dinas	57,004,750	426,380,751	(369,376,001)	(86.631)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:01 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	363,549,135	513,438,908	(149,889,773)	(29.193)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,601,922,561	6,316,972,835	(715,050,274)	(11.32)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,550,187,561)	(5,962,617,835)	412,430,274	(6.917)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(53,927,840)	0	(53,927,840)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	53,927,840	0	53,927,840	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(53,927,840)	0	(53,927,840)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,604,115,401)	(5,962,617,835)	358,502,434	(6.013)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,604,115,401)	(5,962,617,835)	358,502,434	(6.013)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DEDY ARIEF WENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP.197805252000031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,908,991	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,312,500	0
0.0	131111	Tanah	643,068,788	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,970,716,996	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,418,737,430	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	769,438,100	0
0.0	134112	Irigasi	345,372,000	0
0.0	134113	Jaringan	99,677,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	61,180,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,649,594,590
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	976,407,790
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	730,966,195
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	104,533,881
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,919,250
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	42,853,200	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,575,611
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	42,853,200
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	3,908,991
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,182,733,007
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	51,735,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	53,711,310
0.0	391111	Ekuitas	0	6,239,436,581
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,475,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	51,735,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	957,300,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,335	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	79,961,740	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	26,739,200	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	67,520,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,809,060	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	59,384,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	167,575,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,960,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	128,867,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,313	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,613,410	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	795,126	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6,600,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,721,180	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	28,623,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,270,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	47,622,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	3,875,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,370,815,171	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	158,245,176	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	429,496,879	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11,880,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,898,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,648,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	94,179,700	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	152,459,186	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	200,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	31,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	602,906,750	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266,028,050	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,585,400	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	57,004,750	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160,166,146	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111,980,768	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	76,943,810	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,966,486	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,491,925	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	148,163,390	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,364,900	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	25,804,410	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	53,927,840	0
JUMLAH			19,078,850,406	19,078,850,406

Keterangan :
FINAL



Pangkalpinang, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuala Pengguna Anggaran

DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP 197805252000031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,182,733,007
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	51,735,000	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	51,735,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	957,300,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,335	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79,961,740	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,739,200	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	67,520,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,809,060	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59,384,400	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	167,575,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,960,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	128,867,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,313	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,613,410	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	795,126	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,600,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,721,180	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,623,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,270,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	47,622,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,875,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,370,815,171	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	158,245,176	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	428,786,961	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,880,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,979,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	87,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,648,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	94,179,700	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	49,255,000	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	69,251,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	154,274,385	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	200,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	31,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	602,906,750	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266,028,050	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG
Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 4:02 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,585,400	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,004,750	0
JUMLAH			5,234,468,007	5,234,468,007

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
197805252000031002

